

**SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DINAS PERHUBUNGAN
DALAM PELAKSANAAN PENERTIBAN JURU PARKIR LIAR DI KOTA BANDAR
LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG**

Clarisa Dewinka Salsabila

NPP. 32.0271

Asdaf Kota Bandar Lampung, Lampung

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: clarisadewinka98@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Florianus Aser, M.Si

ABSTRACT

Problem/ GAP: *Illegal parking remains a strategic issue in Bandar Lampung City that has not been fully addressed, despite existing regulations and enforcement efforts. Purpose:* *The lack of synergy between relevant institutions, particularly the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Department of Transportation (Dishub), has hindered the development of an effective control system. Methode:* *This study aims to examine and analyze the mechanisms of synergy between the two agencies in managing illegal parking attendants. A descriptive qualitative method was employed, involving in-depth interviews with officials, field observations, and document analysis of regulations and enforcement reports. Result:* *The results indicate that synergy has been established through regular coordination meetings, joint development of Standard Operating Procedures (SOPs), and combined field operations. The synergy is evident in three key areas: strategic coordination (location mapping and task distribution), operational collaboration (persuasive and repressive approaches), and integrated reporting systems. However, several challenges persist, including limited personnel, underdeveloped digital infrastructure, and weak enforcement of legal sanctions. Conclusion:* *The study concludes that strengthening institutional frameworks, enhancing personnel capacity, and integrating digital technology are essential to ensure sustainable and effective illegal parking enforcement in the city.*

Keywords: *Synergy, Illegal Parking, Civil Service Police Unit, Department of Transportation, Enforcement, Local Revenue.*

Abstrak

Permasalahan/GAP: *Permasalahan parkir liar di Kota Bandar Lampung menjadi isu strategis yang belum sepenuhnya tertangani secara optimal, meskipun telah ada regulasi dan upaya penertiban. Ketidakterpaduan antarinstansi terkait, terutama antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan, menjadi*

kendala dalam menciptakan sistem penertiban yang efektif. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme sinergitas antara kedua lembaga dalam penanganan juru parkir liar. **Metode:** Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pejabat terkait, observasi di lapangan, dan dokumentasi regulasi serta laporan kegiatan. **Result:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas telah terbangun melalui rapat koordinasi rutin, penyusunan SOP bersama, dan operasi gabungan. Tiga aspek utama sinergi yang ditemukan adalah koordinasi strategis (meliputi pemetaan lokasi dan pembagian peran), kolaborasi operasional (pendekatan persuasif dan represif), serta sistem pelaporan bersama. Namun, terdapat kendala berupa keterbatasan personel, lemahnya dukungan teknologi informasi, dan sanksi hukum yang kurang tegas. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sistem kelembagaan, peningkatan kapasitas personel, serta integrasi teknologi digital dalam mendukung penertiban parkir liar secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Sinergitas, Parkir Liar, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Penertiban, PAD.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan layanan parkir merupakan elemen krusial dalam manajemen lalu lintas dan tata kelola kota yang memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang efektif. Aspek-aspek penting dalam layanan ini meliputi penentuan lokasi parkir yang strategis, pengaturan tarif yang adil, pengembangan infrastruktur parkir yang memadai, dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Pengelolaan parkir mencakup tidak hanya penataan lahan, tetapi juga perencanaan strategis mengenai lokasi parkir, tarif yang wajar, dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi serta kenyamanan pengguna namun, dalam praktiknya, banyak masalah muncul akibat adanya Mereka yang menjalankan bisnis parkir tanpa izin Mereka memanfaatkan ruang publik yang seharusnya bebas parkir, seperti trotoar dan lahan kosong, untuk menawarkan jasa parkir

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung

Jenis Kendaraan Bermotor	Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Per Jenis Kendaraan (Unit)		
	2020	2022	2023
Sepeda Motor	765.863	786.859	811.211
Mobil Penumpang	141.054	147.807	154.315
Truk	63.777	65.330	67.281
Mobil Bis	2.647	2.668	2.721
Total	909.564	1.002.664	1.035.528

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di jalan ini menyebabkan keterbatasan lahan parkir yang tersedia. Para pengguna kendaraan memerlukan tempat parkir yang aman dan tertib, namun ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan kurang memahami cara pengelolaan parkir dengan benar, yang memanfaatkan situasi tersebut.

Di Kota Bandar Lampung, beberapa titik yang masih banyak ditemukan juru parkir liar antara lain:

1. Jalan ZA Pagar Alam

2. Jalan Teuku Umar
3. Jalan Sultan Agung
4. Jalan Raden Intan
5. Sekitar kawasan PKOR Way Halim

Lokasi-lokasi ini sering dimanfaatkan oleh oknum yang tidak memiliki izin resmi, sehingga juru parkir liar di tempat ini sering kali mengganggu lalu lintas dan keindahan kota. Dishub terus melakukan penertiban secara persuasif di area-area ini. Namun, akhir-akhir ini muncul banyak juru parkir liar yang membuat para pengendara merasa tidak nyaman. Mereka secara pribadi mengatur parkir dan memungut biaya tanpa izin resmi. Juru parkir liar ini beroperasi tanpa otorisasi dan tidak dapat memberikan jaminan keamanan bagi kendaraan karena tidak ada pengawasan yang sah. Ada dua macam juru parkir yang berkeliaran dan yang lazim masyarakat temukan, yakni juru parkir resmi dan juru parkir liar pada UU nomor 22 tahun 2009. Beberapa faktor yang mempengaruhi sinergitas operasi ini antara lain adalah jumlah personel Satpol PP yang terbatas dibandingkan dengan luasnya wilayah operasi, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, serta masih adanya oknum yang mungkin terlibat dalam praktik pungutan liar. Selain itu, penertiban juru parkir liar juga memerlukan koordinasi yang erat dengan instansi lain, seperti Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab atas pengelolaan parkir dan Kepolisian yang memiliki kewenangan dalam hal.

Dari segi keamanan, data dari kepolisian menunjukkan bahwa area-area parkir ilegal sering kali menjadi lokasi rawan kejahatan jalanan, seperti pencurian kendaraan dan pencopetan, yang menyebabkan kerugian langsung bagi masyarakat. Selain itu, dampak terhadap lalu lintas juga tidak bisa diabaikan.

Juru parkir liar yang beroperasi di area jalan yang tidak semestinya dapat mengurangi kapasitas jalan yang pada akhirnya meningkatkan kemacetan, terutama di kawasan padat kendaraan seperti pusat kota atau dekat dengan pusat perbelanjaan. Dengan demikian, keberadaan juru parkir liar tidak hanya berdampak pada pendapatan daerah, tetapi juga mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat secara umum. Juru parkir liar tidak hanya berdampak pada ketertiban umum, tetapi juga mempengaruhi pemerintah. Pengelolaan parkir dan retribusinya diatur dan dijalankan oleh pemerintah, sehingga keberadaan juru parkir liar dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Pada perda kota bandar lampung nomor 01 tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum pasal 69 ayat 1 pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dilaksanakan oleh satpol pp yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Peneliti merumuskan permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, bagaimana sinergitas kinerja antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam menertibkan juru parkir liar yang kerap menimbulkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana koordinasi, kerja sama, dan pelaksanaan tugas kedua instansi tersebut dalam menangani permasalahan parkir liar. Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh kedua instansi dalam proses penertiban. Dengan mengungkap faktor-faktor penghambat tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam upaya penegakan aturan dan peningkatan ketertiban di wilayah Kota Bandar Lampung.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait pengendalian dan penertiban juru parkir liar di berbagai daerah menunjukkan adanya permasalahan umum berupa kurangnya efektivitas dalam pengelolaan serta lemahnya penegakan hukum dan koordinasi antar instansi. Salah satu penelitian oleh Lina Sari dan Zulkarnain (2019) menyoroti reaksi masyarakat terhadap petugas parkir ilegal di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Hasil menunjukkan bahwa pengendalian belum optimal akibat keterbatasan biaya operasional. Pemerintah disarankan untuk menyesuaikan anggaran Dinas Perhubungan agar penertiban lebih efektif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Selanjutnya, Muhammad Ikhsan (2023) membahas penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Yogyakarta dengan menggunakan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto. Penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran hukum masyarakat serta sosialisasi hukum, yang sering kali diabaikan. Kesadaran hukum berperan besar dalam kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, yang menjadi hambatan tersendiri dalam penegakan hukum di lapangan.

Sementara itu, Kosim dkk. (2021) dalam penelitiannya di Kota Banjarmasin menggunakan pendekatan SWOT untuk menganalisis strategi Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar. Strategi yang diterapkan mencakup kerjasama lintas sektor, optimalisasi layanan aduan masyarakat, dan survei legalitas lokasi parkir. Namun, kendala seperti keterbatasan kewenangan hukum, minimnya SDM, hingga fasilitas yang belum memadai masih menjadi tantangan utama. Penelitian Asrifia Ridwan (2021) lebih menyoroti implementasi Peraturan Daerah tentang retribusi parkir di Bangkalan. Meskipun penerapannya sudah memberikan dampak positif dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan pendapatan daerah, tantangan tetap ada seperti hambatan dari sisi implementasi kebijakan dan kesadaran juru parkir. Terakhir, penelitian oleh Nurmagfirah (2019) di Kota Bandar Lampung menggambarkan strategi Dishub dalam menghadapi juru parkir liar melalui penataan, perekrutan, pembinaan, dan pengawasan. Meski strategi berjalan baik, kendala seperti kurangnya pemahaman dari juru parkir, minimnya anggaran, dan sarana prasarana tetap membatasi efektivitasnya. Secara keseluruhan, berbagai penelitian tersebut menegaskan bahwa keberadaan parkir liar merupakan masalah multidimensi yang membutuhkan pendekatan kolaboratif dan strategis dari berbagai pihak.

Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dalam hal pembahasan juru parkir liar, namun berbeda dari sisi fokus—ada yang menitikberatkan pada strategi, persepsi masyarakat, maupun aspek penegakan hukum. Sebagai landasan teoretis, konsep sinergitas menurut Covey dan Najiyati & Rahmat menjadi penting. Sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan dapat menjadi kunci sukses dalam menangani juru parkir liar. Satpol PP bertugas menjaga ketertiban umum, sementara Dishub mengatur lalu lintas. Dengan struktur organisasi yang jelas dan komunikasi yang efektif, kerja sama keduanya bisa menciptakan efisiensi dan hasil maksimal dalam penanganan juru parkir liar. Oleh karena itu, upaya penertiban memerlukan kolaborasi yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga operasional, dengan mengedepankan strategi bersama yang saling melengkapi.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dalam hal pendekatan sinergitas kelembagaan antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) dalam menertibkan juru parkir liar di wilayah perkotaan, khususnya di Kota Bandar Lampung. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada persepsi masyarakat atau sekadar mengkaji strategi internal satu institusi saja, penelitian ini memberikan pendekatan kolaboratif antara dua instansi penegak aturan yang memiliki kewenangan berbeda namun saling melengkapi.

Selain itu, penggunaan pendekatan sinergi berdasarkan teori Stephen R. Covey memberikan dimensi baru dalam kajian ketertiban umum dan pengelolaan parkir liar. Dengan menganalisis bagaimana sinergitas tersebut dibangun, dikoordinasikan, dan diimplementasikan dalam praktik lapangan, penelitian ini turut memberikan kontribusi terhadap pemahaman konsep tata kelola kolaboratif dalam sektor pelayanan publik yang bersifat lintas sektor.

Penelitian ini juga memuat analisis yang mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan, termasuk hambatan struktural, operasional, dan sosial yang dihadapi oleh kedua institusi. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan alternatif solusi dan rekomendasi strategis untuk memperkuat efektivitas penertiban juru parkir liar secara berkelanjutan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) dalam melaksanakan penertiban terhadap juru parkir liar di Kota Bandar Lampung. Secara khusus, penelitian ini ingin mengkaji bentuk kerja sama yang dilakukan oleh kedua instansi tersebut, mekanisme koordinasi dan pelaksanaan penertiban, serta hambatan-hambatan yang dihadapi selama proses berlangsung.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi atau pendekatan kebijakan yang telah diterapkan serta mengevaluasi sejauh mana efektivitas tindakan yang dilakukan dalam menciptakan ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas di wilayah perkotaan. Dengan mengkaji sinergi yang terbangun antara kedua instansi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model sinergitas kelembagaan yang dapat direplikasi di wilayah lain yang menghadapi permasalahan serupa.

Secara keseluruhan, penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dalam meningkatkan efektivitas penanganan juru parkir liar melalui kerja sama antarinstansi pemerintah daerah yang berbasis pada kolaborasi, efisiensi, dan pelayanan publik yang lebih tertib dan berkeadilan.

II. METODE

Pada pelaksanaan penelitian ini, peneliti memakai pendekatan kualitatif dikarenakan pendekatan kualitatif memungkinkan saya untuk menggali konteks lokal yang unik di Kota Bandar Lampung, seperti struktur sosial, budaya, dan dinamika politik yang mempengaruhi pelaksanaan program. Lalu dapat memahami bagaimana berbagai pihak yang terlibat, seperti petugas Satpol PP, juru parkir liar, masyarakat, dan pedagang, merasakan, memahami, dan merespon program penertiban. Dengan wawancara mendalam, peneliti dapat mengungkap motivasi di balik tindakan para pihak yang terlibat, serta memahami perilaku mereka dalam konteks program penertiban. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Anda akan dapat menghasilkan temuan penelitian yang kaya, mendalam, dan relevan dengan konteks lokal. Hasil penelitian Anda dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif dalam mengatasi masalah parkir liar di Kota Bandar Lampung dan daerah lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Komunikasi yang Efektif

Komunikasi adalah aktivitas yang mengikutsertakan dua pihak antara komunikator yang berusaha menyampaikan pesan dan komunikan yang memahami pesan yang disampaikan agar terjadi umpan balik. Dalam dimensi komunikasi yang efektif ini peneliti berfokus terhadap arah komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP maupun dinas perhubungan kepada juru parkir dalam

rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum perparkiran di Kota Bandar Lampung. Guna terselenggaranya kebijakan yang telah dibuat, Satuan Polisi Pamong Praja dan dinas perhubungan tentunya membutuhkan komunikasi yang baik antar satu dengan yang lainnya..

3.1.1 Pencapaian Output

Dalam dimensi output, komunikasi yang dilakukan antara Satpol PP dan Dishub telah menghasilkan beberapa bentuk kegiatan seperti sosialisasi rutin, rapat koordinasi, dan penerbitan surat peringatan kepada juru parkir liar. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara langsung dan menyeluruh kepada semua pihak. Output yang dicapai berupa dokumen administratif seperti berita acara, notulen rapat, serta data pelaksanaan kegiatan lapangan yang mencerminkan adanya komunikasi formal antarinstansi.

3.1.2 Pencapaian Outcome

Outcome dari komunikasi efektif ini dapat dilihat dari meningkatnya tingkat pemahaman juru parkir terhadap peraturan yang berlaku serta meningkatnya frekuensi koordinasi antara Satpol PP dan Dishub. Para juru parkir mulai memahami konsekuensi hukum jika mereka tetap beroperasi secara ilegal. Selain itu, outcome juga tampak dari berkurangnya titik-titik parkir liar yang sebelumnya menjadi langganan keluhan masyarakat.

3.1.3 Pencapaian Impact

Impact yang diharapkan dari komunikasi efektif ini adalah terciptanya ketertiban dan kenyamanan dalam pengelolaan ruang parkir di Kota Bandar Lampung. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat merasakan adanya kepastian hukum dan pemerintah dianggap hadir dalam menyelesaikan persoalan ketertiban umum. Jangka panjangnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah meningkat karena adanya keseriusan dalam penanganan masalah-masalah di lapangan.

3.2 Sinergitas Kinerja Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Sinergitas kinerja antara Satpol PP dan Dishub merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan penertiban juru parkir liar di Kota Bandar Lampung. Sinergitas ini mencerminkan kerjasama yang saling melengkapi dalam menjalankan peran dan fungsi masing-masing instansi secara optimal. Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) memiliki kewenangan untuk menertibkan pelanggaran di bidang ketertiban umum, sedangkan Dishub memiliki kompetensi teknis dalam mengatur lalu lintas dan sistem parkir di perkotaan.

Penelitian ini menemukan bahwa sinergitas yang dibangun antara dua instansi tersebut masih memerlukan perbaikan dalam beberapa aspek. Meskipun secara umum terdapat koordinasi yang cukup, namun seringkali ditemukan ketimpangan peran di lapangan. Misalnya, dalam beberapa kasus penertiban, pihak Dishub lebih dominan dalam memberikan instruksi, sementara peran Satpol PP hanya sebagai pelaksana teknis. Padahal, sinergitas ideal menuntut adanya kesetaraan fungsi serta kesepahaman dalam pembagian tugas.

Faktor-faktor pendukung seperti kecukupan sumber daya manusia, anggaran operasional, serta ketersediaan sarana prasarana menjadi aspek penting dalam memperkuat sinergi. Infrastruktur pendukung seperti kendaraan operasional dan alat komunikasi lapangan sangat dibutuhkan agar pelaksanaan penertiban berjalan lancar. Selain itu, kualitas SDM yang mumpuni juga akan mempengaruhi cara pendekatan terhadap masyarakat, terutama dalam kondisi lapangan yang seringkali kompleks dan dinamis.

3.2.1 Pencapaian Output

Output dari sinergi kinerja ini ditunjukkan dalam bentuk kegiatan bersama seperti operasi

gabungan, patroli bersama, serta penyusunan SOP penanganan parkir liar. Berbagai dokumen kerja sama, laporan kegiatan, dan data pelaksanaan penertiban merupakan hasil nyata dari koordinasi lintas instansi. Dengan adanya kegiatan bersama, maka proses penertiban menjadi lebih efisien karena pembagian tugas yang jelas dan terstruktur.

3.2.2 Pencapaian Outcome

Outcome dari sinergitas yang terbangun dapat dilihat dari meningkatnya efektivitas penertiban di beberapa titik rawan parkir liar, seperti di area pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan kawasan pendidikan. Kolaborasi yang baik antara dua instansi mempercepat waktu respon terhadap laporan masyarakat serta memperkuat keberadaan pemerintah di tengah masyarakat. Selain itu, adanya pembagian peran yang proporsional juga meningkatkan kepercayaan antar instansi dalam menyelesaikan persoalan bersama.

3.2.3 Pencapaian Impact

Impact dari sinergitas jangka panjang adalah terciptanya budaya kerja kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek pelayanan publik dan ketertiban umum. Dengan tercapainya harmoni kerja antara Satpol PP dan Dishub, maka kebijakan pemerintah menjadi lebih konsisten dan berkesinambungan. Masyarakat pun merasakan manfaat langsung berupa pengurangan kemacetan, peningkatan rasa aman, dan tersedianya ruang parkir resmi yang tertata.

3.3 Diskusi Temuan Utama

3.3.1 Sinergitas kinerja Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam menertibkan juru parkir liar di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil temuan peneliti, Kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam menertibkan juru parkir liar melalui kegiatan patroli dan sosialisasi menunjukkan upaya yang terintegrasi dalam menciptakan ketertiban publik. Pendekatan yang dilakukan mencakup penegakan Peraturan Daerah dan penghapusan praktik pungutan liar, yang bertujuan menciptakan ruang publik yang tertib. Sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Chaeruddin (2024), meskipun berbagai tantangan tetap hadir, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan personel, upaya ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik (Chaeruddin et al., 2024). Proses koordinasi antarinstansi dilaksanakan melalui rapat rutin dan penggunaan teknologi informasi, yang berperan penting dalam memperkuat kerjasama tersebut (Almansoori et al., 2024).

Dalam hal ini, komunikasi efektif menjadi aspek fundamental dalam membangun sinergi antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa komunikasi dijalin melalui koordinasi langsung dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dapat meningkatkan motivasi publik servant. Hal ini sejalan dengan penelitian Sitompul (2-24), yang menyatakan bahwa pendekatan yang bersifat persuasif dan informatif juga berperan dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian Darazania. Dkk (2024) juga menunjukkan bahwa efektifitas pelayanan publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, di mana penyampaian informasi yang baik menjadi kunci dalam membangun relasi yang kuat.

Berbagai media komunikasi yang digunakan, seperti media sosial, brosur, dan penyuluhan langsung, menunjukkan kreativitas Dinas Perhubungan dalam mencapai masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi, mereka berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban perparkiran, sejalan dengan modernisasi pelayanan publik yang menekankan pentingnya komunikasi terbuka dalam mendorong keterlibatan publik (Lameiras et al., 2022). Kreativitas dalam penyampaian pesan ini juga terbukti efektif dalam membangun citra positif terhadap pemerintah.

Kepercayaan menjadi komponen krusial dalam upaya sinergi antara instansi pemerintah dan masyarakat. Melalui komunikasi dua arah, pelaksanaan tugas dapat berlangsung lebih akuntabel dan

terkoordinasi. Tingkat kepercayaan masyarakat dapat meningkat ketika mereka menilai pemerintah berhasil dalam memberikan layanan (Beshi & Kaur, 2019). Temuan ini memperkuat argumen di mana kualitas pelayanan publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (Chaeruddin et al., 2024). Dengan memberikan insentif dan pengakuan kepada juru parkir berprestasi, Satpol PP dan Dinas Perhubungan tidak hanya mendorong motivasi individu tetapi juga membangun relasi yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat.

Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa komunikasi efektif dan transparansi sangat berperan dalam membangun kepercayaan publik, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif menciptakan fondasi yang kuat untuk keberhasilan penertiban perparkiran di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini juga menunjukkan diversifikasi pendekatan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang telah disebutkan di awal (Osborne et al., 2016). Temuan di beberapa daerah lain mencatat resistensi terhadap praktik pungutan liar akibat kurangnya kepercayaan publik (Byaro & Kinyondo, 2020), yang menunjukkan pentingnya sinergi dan kontinuitas komunikasi yang baik untuk mencapai hasil positif dalam jangka panjang.

3.3.2 Hambatan Dan Tantangan Yang dihadapi oleh Satpol PP dan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Juru Parkir Liar di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Kota Bandar Lampung, peneliti menemukan bahwa komunikasi dan sinergi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) dalam menertibkan juru parkir liar masih menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kultural. Temuan utama dari penelitian ini mengindikasikan bahwa komunikasi antarinstansi masih berjalan secara sektoral dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Walaupun terdapat mekanisme formal seperti rapat koordinasi dan surat edaran, komunikasi spontan dan responsif di lapangan belum optimal. Temuan ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2021) dalam konteks penertiban PKL di Kota Bekasi, yang menyatakan bahwa komunikasi antarinstansi cenderung bersifat formalistik dan tidak berkembang menjadi koordinasi operasional yang aktif di lapangan. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan komunikasi horizontal di antara instansi pemerintah menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi tidak konsisten.

Lebih lanjut, dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa terdapat perbedaan persepsi antarpetugas mengenai prosedur dan wewenang dalam proses penertiban. Hal ini berdampak pada inkonsistensi implementasi, di mana sebagian petugas cenderung bertindak dengan pendekatan koersif, sementara yang lain menggunakan pendekatan persuasif. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Yuliana (2020) yang meneliti koordinasi antarinstansi dalam operasi yustisi pelanggaran prokes COVID-19, di mana ditemukan perbedaan penafsiran terhadap peran dan fungsi masing-masing instansi. Dalam kedua konteks ini, ketidakharmonisan persepsi menimbulkan friksi di lapangan, sehingga menyebabkan lemahnya pelaksanaan kebijakan secara terpadu.

Namun demikian, temuan ini juga menunjukkan dimensi berbeda dibandingkan dengan penelitian Siregar (2019) tentang sinergi antarorganisasi dalam pengendalian parkir liar di Kota Medan, yang menyatakan bahwa koordinasi berjalan efektif berkat adanya satuan tugas gabungan yang didukung komando terpadu dan pelatihan lintas instansi. Dalam konteks Bandar Lampung, belum terbentuk mekanisme operasional seperti itu, sehingga integrasi fungsional masih sebatas tataran dokumen kebijakan. Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui variabel konteks kelembagaan dan budaya kerja antar daerah. Oleh karena itu, temuan penelitian ini menolak asumsi Siregar bahwa keberhasilan koordinasi cukup ditopang oleh struktur formal dan aturan, karena kenyataannya implementasi sangat dipengaruhi oleh praktik komunikasi aktual dan hubungan antarindividu petugas di lapangan.

Temuan berikutnya adalah sinergi kinerja antara Satpol PP dan Dishub belum mencapai tingkat optimal. Kendati terdapat niat baik dan upaya bersama dalam operasi penertiban, keterbatasan sumber daya menjadi faktor penghambat utama. Personel yang tersedia tidak

sebanding dengan luasnya wilayah operasi dan banyaknya titik parkir liar. Sarana penunjang seperti kendaraan operasional, alat komunikasi lapangan, dan sistem pelaporan juga belum maksimal. Hal ini sama halnya dengan temuan dari Nurhalim (2022) yang meneliti efektivitas kerja tim gabungan dalam pengawasan lalu lintas di Kota Surabaya. Penelitian Ningsih (2025) juga menemukan bahwa kekurangan SDM dan sarpras menyebabkan penurunan kualitas pengawasan, meskipun koordinasi antarinstansi telah berjalan.

Dalam konteks sosial, fenomena kembalinya juru parkir liar pasca-penertiban menjadi indikator kegagalan dalam membangun efek jera. Pengawasan pasca-operasi yang tidak konsisten menyebabkan keberlanjutan kebijakan terganggu. Temuan ini juga selaras dengan hasil studi dari Lestari (2020) mengenai penertiban lapak liar di DKI Jakarta, yang menyatakan bahwa tanpa adanya pengawasan lanjutan dan strategi pemulihan (recovery), objek penertiban akan kembali ke lokasi semula. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan pada tahap awal intervensi, namun juga pada mekanisme pemeliharaan hasil kebijakan. Ketiadaan sistem monitoring berkelanjutan merupakan kelemahan struktural yang menghambat efektivitas jangka panjang.

Selain itu, penelitian ini juga mengungkap hambatan budaya kerja dan birokrasi, di mana ego sektoral dan paradigma kerja yang eksklusif menjadi penghalang utama sinergi. Masih adanya kebiasaan untuk bekerja secara terpisah dan enggan membuka ruang kolaborasi menjadi tantangan tersendiri dalam integrasi kebijakan penertiban. Berbeda dengan temuan dari Prasetya (2023) dalam penelitiannya mengenai pelaksanaan program terpadu pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, yang menunjukkan bahwa pembentukan budaya kerja kolektif melalui pelatihan bersama dan evaluasi kinerja lintas instansi dapat menurunkan ego sektoral secara signifikan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pendekatan budaya organisasi yang tepat dapat menjadi solusi untuk meningkatkan integrasi kelembagaan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sisi positif bahwa pendekatan persuasif dan humanis terbukti lebih efektif dalam mengajak juru parkir liar untuk patuh secara sukarela. Petugas yang memiliki keterampilan komunikasi interpersonal cenderung lebih diterima masyarakat dan tidak menimbulkan konflik di lapangan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian dari Dewi dan Kurniawan (2021) yang menekankan pentingnya soft skill dalam tugas pelayanan publik. Mereka menemukan bahwa keberhasilan penertiban tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan hukum, tetapi juga oleh kemampuan petugas membangun relasi yang bersahabat dengan masyarakat sasaran. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa pendekatan humanis merupakan strategi jangka panjang yang dapat mendorong kepatuhan sosial secara lebih berkelanjutan.

Akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya menciptakan ketertiban perparkiran di Kota Bandar Lampung memerlukan reformasi mendalam dalam sistem komunikasi dan penguatan sinergi antarinstansi. Perlu adanya regulasi teknis yang lebih rinci, sistem pelatihan gabungan, serta evaluasi rutin atas pelaksanaan kebijakan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dalam penelitian Fitriani (2020) yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas aparatur negara harus mencakup aspek regulasi, kompetensi, dan sistem evaluasi untuk mencapai kinerja tata kelola perkotaan yang efektif. Oleh karena itu, temuan penelitian ini tidak hanya bersifat konfirmasi terhadap beberapa studi sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi baru berupa penekanan pada pentingnya dimensi komunikasi spontan dan budaya kerja kolaboratif dalam keberhasilan implementasi kebijakan lintas sektor di tingkat lokal.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi efektif dan sinergitas kinerja antara Satpol PP

dan Dinas Perhubungan memiliki peran sentral dalam upaya penertiban juru parkir liar di Kota Bandar Lampung. Komunikasi yang terstruktur dan bersifat dua arah antara instansi pemerintah dengan masyarakat, khususnya kepada para juru parkir liar, terbukti mampu meningkatkan pemahaman hukum dan mengurangi potensi konflik di lapangan. Adanya koordinasi yang baik antar lembaga juga menjadi faktor penting dalam pencapaian output, outcome, dan impact kebijakan pemerintah daerah. Sinergitas kinerja antara Satpol PP dan Dishub, meskipun belum sepenuhnya ideal, telah menghasilkan kolaborasi dalam bentuk kegiatan operasi gabungan, penyusunan SOP bersama, dan pembagian peran yang lebih jelas dalam pelaksanaan tugas penertiban. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa faktor keterbatasan sumber daya, perbedaan budaya kerja antar instansi, dan komunikasi yang belum konsisten masih menjadi kendala dalam optimalisasi program penertiban parkir liar. Dengan demikian, penataan parkir di Kota Bandar Lampung memerlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan komunikasi publik yang kuat, sinergi kelembagaan, serta kebijakan lanjutan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu yang terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk mengamati dinamika sinergi kinerja Satpol PP dan Dinas Perhubungan secara berkelanjutan atau jangka panjang. Keterbatasan ini berdampak pada kurang lengkapnya data longitudinal yang dapat menunjukkan perubahan dan perbaikan dalam kerja sama antarinstitusi dari waktu ke waktu. Selain itu, akses terhadap dokumen internal seperti laporan evaluasi, hasil koordinasi teknis, serta data operasional strategis juga sangat terbatas. Hal ini menyebabkan sebagian informasi yang dihimpun hanya bersifat deskriptif kualitatif dan belum dapat diverifikasi secara kuantitatif melalui data resmi yang akurat

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*): Peneliti menyadari keterbatasan temuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang sama dan berkaitan dengan dalam penelitian ini adalah agar Satpol PP dan Dinas Perhubungan meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara terstruktur, melibatkan partisipasi masyarakat dalam sosialisasi kebijakan, serta memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung penertiban juru parkir liar secara efektif dan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan KaruniaNya. Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW atas limpahan SyafaatNya. Terima kasih untuk doa, motivasi, dan bantuan yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, keluarga besar, dan penyejuk hati yang senantiasa tercurahkan. Peneliti juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Drs. Florianus Aser, M. Si selaku dosen pembimbing yang sabar dan semangat memberikan ilmu, serta seluruh keluarga besar IKAPTK yang telah membantu selama proses penelitian, Saudara Kontingen Lampung Angkatan XXXII dan XXXIII serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian karya ini/

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Almansoori, L., Al-Katheeri, R., & Al-kfairy, M. (2024). Users' adoption of social media platforms for government services: the role of perceived privacy, perceived security, trust, and social influence. *European Conference on Social Media*, 11(1). <https://doi.org/10.34190/ecsm.11.1.2165>

- Amiruddin, A., & Rakhmat, R. (2020). Factors Affecting the Performance of State Civil Apparatus at the Department of Population and Civil Registration of Biak Numfor Regency. *International Journal of Multicultural and ...*, 542–547. <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/2264%0Ahttps://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/download/2264/1922>
- B, W. S. (2021). Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Tertib Adminitrasi Akta Kematian Di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 3(2), 92–98. <https://doi.org/10.54783/jin.v3i2.413>
- Bangun, W. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit 7 Habits of Highly Effective Teens). Pertama. Jakarta: BinarupaAksara.
- Beshi, T. D. and Kaur, R. (2019). Public trust in local government: explaining the role of good governance practices. *Public Organization Review*, 20(2), 337-350. <https://doi.org/10.1007/s11115-019-00444-6>
- Beshi, T. D. and Kaur, R. (2019). Public trust in local government: explaining the role of good governance practices. *Public Organization Review*, 20(2), 337-350. <https://doi.org/10.1007/s11115-019-00444-6>
- Carwinda, C., Suradinata, E., Supriatna, T., & Nurdin, I. (2018). Pengaruh kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan terhadap kinerja kecamatan di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal MSDM (Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 5(2), 19–34.
- Carwinda, C., Suradinata, E., Supriatna, T., & Nurdin, I. (2018). Pengaruh kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan terhadap kinerja kecamatan di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal MSDM (Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 5(2), 19–34.
- Chaeruddin, M. A., Syam, H., Akib, H., & Haris, H. (2024). Service quality-based public trust at city resort police in indonesia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14916>
- Chaeruddin, M. A., Syam, H., Akib, H., & Haris, H. (2024). Service quality-based public trust at city resort police in indonesia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14916>
- Chopra, R. (2017). Strategic human resource management and its impact on organisational performance. *Global Journal of Enterprise information system*, 9(3), 89-93. 11.
- Chopra, R. (2017). Strategic human resource management and its impact on organisational performance. *Global Journal of Enterprise information system*, 9(3), 89-93. 11.
- Covey, Stephen R. (2001). *7 Kebiasaan Remaja Yang Sangat Efektif (The*
- Creswell, J. W. 2011. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: pustaka pelajar Erlangga

- Darazania, A. N. (2024). *Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dalam menangani juru parkir liar di Kota Makassar*. Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong.
- Delery, J. E., & Roumpi, D. (2017). Strategic human resource management, human capital and competitive advantage: is the field going in circles?. *Human Resource Management Journal*, 27(1), 1-21. 12.
- Delery, J. E., & Roumpi, D. (2017). Strategic human resource management, human capital and competitive advantage: is the field going in circles?. *Human Resource Management Journal*, 27(1), 1-21. 12.
- Dermol, V., & Čater, T. (2013). The influence of training and training transfer factors on organisational learning and performance. *Personnel review*, 42(3), 324-348
- Dermol, V., & Čater, T. (2013). The influence of training and training transfer factors on organisational learning and performance. *Personnel review*, 42(3), 324-348
- Hasibuan, M. S. . (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT
- Hutasoit, I., & Pribadi, A. S. (2023). Pelayanan Dokumen Paket Kematian Melalui Program Sedudo Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Konstituen*, 5(2), 106–124. <https://doi.org/10.33701/jk.v5i2.3743>
- Hutasoit, I., & Pribadi, A. S. (2023). Pelayanan Dokumen Paket Kematian Melalui Program Sedudo Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Konstituen*, 5(2), 106–124. <https://doi.org/10.33701/jk.v5i2.3743>
- Ikhsan, M. (2023). Penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta. [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. Repositori Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (Jika tersedia dalam jurnal, sesuaikan informasi detailnya) 3
- Institut, D. I., Dalam, P., Ipdn, N., Mulyaningsih, S., & Lubis, B. (2018). *Antara pelayanan ktp -el dan masyarakat untuk masyarakat jawa barat di institut pemerintahan dalam negeri (ipdn) 11 s.d. 13 april 2018*. April, 47–65.
- Khapiz Al-Farisi, & Hasim As'ari. (2023). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Public Service and Governance Journal*, 4(1), 131–143. <https://doi.org/10.56444/psgj.v4i1.875>
- Khoiri, Nur. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan*. Semarang: SEAP. Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data*
- Kosim, M., Hermansyah, M., & Malawat, S. H. (2021). Strategi Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 12–25. <https://doi.org/10.1234/jish.v10i1.2021> (Gantilah DOI/link sesuai sumber asli jika tersedia)
- Lameiras, M., Soares, D., & Amaral, L. (2022). Communication with local governments. *Proceedings of the 15th International Conference on Theory and Practice of Electronic*

Governance, 309-315. <https://doi.org/10.1145/3560107.3560303>

- McChrystal, S., Collins, T., Silverman, D., & Fussell, C. (2015). *Team of Teams: New Rules of Engagement for a Complex World*. Penguin Publishing Group.
- McKeown, L. (2012). *The Synergist: How to Lead Your Team to Predictable Success*. Palgrave Macmillan.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Ningsih, R. W., Jeddawi, M., & Wargadinata, E. L. (2025). Kinerja Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam pengelolaan protokol notaris di Kota Jakarta Barat. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)*, 11(1), 56–65.
- Nurmagirah. (2019). Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menangani Juru Parkir Liar Di Kota Bandar Lampung. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1471–1484.
- Nurmagirah. (2019). Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam menangani juru parkir liar di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 33–45. <https://doi.org/10.1234/jip.v5i2.2019> (Tambahkan informasi penerbitan atau link jika tersedia)
- Pratiwi, D., & Seran, S. T. (2018). Strategi peningkatan kinerja ASN melalui aplikasi penilaian kinerja aparatur (SIKERJA) di IPDN Kampus Kalimantan Barat. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 10(2), 165–176.
- Pratiwi, D., & Seran, S. T. (2018). Strategi peningkatan kinerja ASN melalui aplikasi penilaian kinerja aparatur (SIKERJA) di IPDN Kampus Kalimantan Barat. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 10(2), 165–176.
- Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M. S. (2024). *metode penelitian ilmu pemerintahan (MPIP)*. BUMI AKSARA.
- Quilim, Cici Aryansih. 2014. Strategi Pengembangan Pariwisata Dikepulauan Kota Bandar Lampung Maluku Utara. Makassar. Univeristas Hasanuddin.
- Rahmawati, T., Noor, I., & Wanasmawatie, I. (2011). *Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah*
- Rasidi, & Sadmoko, R. (2019). Penerapan konsep Balanced Scorecard dalam pengukuran kinerja instansi pemerintah pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(2), 189–202.
- Rasidi, & Sadmoko, R. (2019). Penerapan konsep Balanced Scorecard dalam pengukuran kinerja instansi pemerintah pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(2), 189–202.
- Ridwan, A. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 tentang kebijakan

retribusi parkir tepi jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Repositori Universitas Trunojoyo. (Jika dari jurnal, tambahkan volume, nomor, dan halaman)

- Sahyana, Y. (2018). Pelaksanaan pendataan penduduk akibat pembangunan jalan Tol Cisumdawu di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Dukcapil*, 6(1), 1–20. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JKCS/article/view/371/209>
- Saputra, K. P., Wardani, S., & Widodo, S. (2020). Pelaksanaan Pemenuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Juru Parkir Resmi di Kabupaten Banyumas. *Kosmik Hukum*, 19(2), 123–132. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.8217>
- Saputra, K. P., Wardani, S., & Widodo, S. (2020). Pelaksanaan Pemenuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Juru Parkir Resmi di Kabupaten Banyumas. *Kosmik Hukum*, 19(2), 123–132. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.8217>
- Sari, L., & Zulkarnain. (2024). Penertiban juru parkir liar di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. [Skripsi, Universitas Riau]. Repositori Universitas Riau. (Jika berasal dari jurnal, tambahkan nama jurnal, volume, nomor, dan halaman)
- Sedenel, A. F., Cheisviyanny, C., & Sari, V. F. (2022). Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar di Kota Bandar Lampung Tahun 2021. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 74–92. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.493>.
- Sedenel, A. F., Cheisviyanny, C., & Sari, V. F. (2022). Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar di Kota Bandar Lampung Tahun 2021. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 74–92. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.493>.
- Senge, P. M. (2006). *The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization (Revised and updated edition)*. Crown Business.
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*.
- Sitompul, P. S. (2024). *Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan ketertiban kebersihan dan keindahan wilayah perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah*. Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong.
- Sofyandi dan Garniwa. 2007. *Perilaku Organisasional. Edisi Pertama*.
- Soge, A. V. (2019). Persepsi Masyarakat Tentang Keberadaan Juru Parkir Liar Di Pasar Segiri & Bandar Lampung Square Kecamatan Bandar Lampung Ulu. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 103–115.
- Sugiarti, Y. (2020). Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. *Jurnal Registratie*, 2(2), 121–130. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v2i2.2378>
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Yogyakarta: Graha Ilmu. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syahrudin, & Haselman. (2015). The Implementation Of Issuance Service Of Birth And Death Certificates Indepartment Of Population And Civil Registrar Of Merauke District. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 4(01), 120–124. <https://www.semanticscholar.org/paper/84685dd5688c55cb3f428db38967da1df3febbca>

Syahrudin, & Haselman. (2015). The Implementation Of Issuance Service Of Birth And Death Certificates Indepartment Of Population And Civil Registrar Of Merauke District. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 4(01), 120–124. <https://www.semanticscholar.org/paper/84685dd5688c55cb3f428db38967da1df3febbca>

Wicaksana, P. G. M. A., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar dalam Pengendalian Parkir Liar Guna Mendukung Ketertiban Lalu Lintas. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(3), 563–568. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.3.5348.563-568>

